

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecenderungan pertumbuhan wilayah di Indonesia dapat dicirikan dengan adanya pertumbuhan penduduk yang berlangsung sangat pesat. Pertumbuhan penduduk yang benar-benar pesat ini akan berdampak pada peningkatan permintaan infrastruktur dan layanan yang berkualitas. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dapat mempengaruhi kepuasan dalam segala aspek kehidupan, salah satunya adalah dalam pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi kehidupan manusia dan keluarganya, terutama di daerah perkotaan yang terdapat di wilayah pesisir.

Kota yang terdapat di wilayah pesisir menjadi daerah yang paling strategis dan mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini dikarenakan daerah pesisir memiliki potensi ekonomi yang tidak hanya memanfaatkan sumber daya darat tetapi juga sumber daya laut. Pesisir juga memiliki sumber daya yang sangat beragam dan penting bagi kelangsungan suatu peradaban. Berbagai aktivitas sosial dan ekonomi yang terjadi di pesisir dapat menjadi magnet bagi pengembangan wilayah kota yang ada di pesisir. Pengembangan wilayah kota yang ada di pesisir dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif.

Pengembangan wilayah kota yang ada di pesisir dapat menimbulkan berbagai dampak, salah satu dampaknya adalah adanya arus urbanisasi yang dapat meningkatkan kepadatan permukiman dan menimbulkan banyak permasalahan akibat terbatasnya pelayanan dasar, seperti terbatasnya sarana dan

prasarana. Salah satu dampak dari adanya urbanisasi adalah terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Di Indonesia, penurunan kualitas lingkungan biasanya terjadi pada daerah lingkungan padat, seperti lingkungan permukiman kumuh yang terdapat di perkotaan yang ada di wilayah pesisir. Pengelolaan penggunaan lahan tidak optimal, wujud bangunan yang semrawut, sarana dan prasarana lingkungan yang kurang memadai merupakan pertanda terjadinya penurunan kualitas lingkungan.

Selain itu, pesatnya perkembangan kawasan perkotaan akan menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan di kawasan perkotaan terutama di wilayah pesisir. Hal ini dikarenakan tingkat pendapatan setiap penduduk berbeda-beda, sehingga daya beli mereka terhadap rumah juga akan berbeda. Bagi penduduk perkotaan yang bekerja di sektor ekonomi berpenghasilan rendah, kebutuhan akan tempat tinggal merupakan masalah serius bagi mereka. Adanya persaingan untuk mendapatkan lahan perumahan di kota akan menaikkan harga lahan perkotaan. Sehingga dampaknya adalah kebanyakan dari mereka akan membangun rumah di kawasan legal sehingga beban di pusat kota melebihi daya tampung masyarakat. Namun, sebagian dari mereka juga membangun shelter di kawasan ilegal (seperti rel kereta api atau bantaran sungai). Keadaan ini dapat menimbulkan beberapa kegiatan yang saling tidak mendukung, seperti munculnya permukiman tidak terencana dan terbentuknya permukiman kumuh.

Permukiman yang kumuh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 merupakan permukiman yang memprihatinkan karena ketidaknormalan bangunan, derajat ketebalan bangunan yang tidak dapat disangkal

dan sifat struktur serta perkantoran dan pondasi yang tidak memenuhi syarat. Kawasan permukiman kumuh merupakan bagian dari wilayah administrasi pemerintahan yang memiliki karakteristik dengan tingkat permasalahan secara khusus dan keberadaannya perlu mendapatkan penanganan secara spesifik, baik dari aspek fisik, ekonomi, sosial, maupun infrastrukturnya.

Penanganan permukiman kumuh tidak hanya memperbaiki satu atau dua sektor saja, tetapi harus memperhatikan berbagai sektor yang terdapat di wilayah tersebut. Dalam hal inilah dibutuhkan peran pemerintah dan masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh tersebut untuk dapat berperan dan berkoordinasi untuk mendapatkan solusi dalam menangani permukiman kumuh. Permukiman kumuh harus segera di atasi, karena nantinya dapat menimbulkan banyak permasalahan, terutama munculnya berbagai perilaku menyimpang, seperti kejahatan dan masalah sosial lainnya.

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, salah satunya adalah kota Tanjungbalai. Kota Tanjung Balai terletak di kawasan pantai timur pulau sumatera dan wilayahnya merupakan bagian hilir dari Sungai Asahan. Secara astronomis, kota Tanjungbalai terletak diantara $2^{\circ}56'33''$ – $3^{\circ}00'08''$ Lintang Utara dan $99^{\circ}48'11''$ - $99^{\circ}48'36''$ Bujur Timur. Kota Tanjung Balai memiliki area seluas $60,52 \text{ km}^2$ yang terdiri atas 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan. Kota Tanjungbalai merupakan salah satu kota di Sumatera Utara yang menjadi pusat aktivitas sosial ekonomi dan permukiman masyarakat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Tanjungbalai pada

tahun 2019, jumlah penduduk kota Tanjungbalai berjumlah 175.223 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.895 jiwa/km². Sehingga hal ini dapat mengakibatkan terjadinya perluasan kawasan permukiman dengan minimnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman, sehingga dapat mengakibatkan munculnya penurunan kualitas lingkungan permukiman dan berbagai permasalahan penataan ruang. Salah satu permasalahan penataan ruang yang ada di kota Tanjungbalai yaitu adanya permukiman kumuh.

Menurut SK Walikota Tanjung Balai Nomor : 600/352/K/2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Tanjungbalai Tahun 2016, terdapat 27 kawasan permukiman kumuh dengan luas keseluruhan 598,18 Ha, dan tersebar pada 6 Kecamatan yang ada di Kota Tanjung Balai. Berdasarkan daftar kawasan perumahan dan permukiman kumuh Kota Tanjung Balai yang ditetapkan dengan SK Walikota, Kecamatan Datuk Bandar Timur merupakan salah satu titik kawasan permukiman kumuh yang berada di Kota Tanjung Balai.

Permukiman kumuh yang terdapat di Kecamatan Datuk Bandar Timur tersebar di 5 kelurahan, adapun luas permukiman kumuh pada masing-masing kelurahan, yaitu Kelurahan Bunga Tanjung seluas 10,10 Ha; Kelurahan Pulau Simardan seluas 37,15 Ha; Kelurahan Selat Lancang seluas 2,27 Ha; Kelurahan Selat Tanjung Medan seluas 8,58 Ha; dan Kelurahan Semula Jadi seluas 23,48 Ha. Berdasarkan hal tersebut, Kelurahan Pulau Simardan memiliki luas wilayah kumuh paling tinggi, sehingga hal ini menjadi tantangan bagi semua pihak untuk menangani permukiman kumuh tersebut, baik pemerintah ataupun masyarakat.

Kelurahan Pulau Simardan merupakan salah satu kelurahan di Kota Tanjungbalai yang memiliki luas 67,5 Ha dan terdiri dari 12 lingkungan. Kelurahan Pulau Simardan memiliki topografi yang datar dan berbatasan langsung dengan aliran sungai Asahan. Pertumbuhan penduduk di Kelurahan Pulau Simardan semakin lama semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada bulan Maret tahun 2021, jumlah penduduk Kelurahan Pulau Simardan sebanyak 6.357 jiwa, sedangkan luas lahan permukiman relatif tetap, yaitu 67,5 Ha, sehingga penduduk sulit untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak dan nyaman. Akibatnya, penduduk membangun permukiman di pinggir sungai. Kondisi permukiman yang ada di Kelurahan Pulau Simardan termasuk kumuh, karena pembangunan permukiman tidak dibarengi dengan perencanaan permukiman yang baik, sehingga muncul lah lingkungan permukiman padat dan kumuh.

Selain itu, faktor permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Pulau Simardan adalah permasalahan sarana dan prasarana lingkungan seperti bangunan rumah yang tidak beraturan, keadaan jalan yang kondisinya tidak memadai, kondisi hunian tidak terlayani air bersih serta saluran pembuangan limbah rumah tangga yang tercampur dengan drainase lingkungan. Kondisi tersebut yang menyebabkan permukiman tersebut kotor dan tidak terawat. Sehubungan dengan hal ini, perlu dianalisis mengenai permukiman kumuh yang terdapat di Kelurahan Pulau Simardan dan upaya pemerintah maupun masyarakat dalam menangani permukiman kumuh tersebut melalui kebijakan ataupun strategi yang dapat digunakan. Hal ini lah yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian

yang berjudul Analisis Permukiman Kumuh di Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan :

1. Kepadatan penduduk yang tinggi akibat dari tingginya arus urbanisasi sehingga meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal.
2. Karakteristik fisik permukiman kumuh yang dilihat dari kriteria perumahan dan permukiman kumuh menurut kementerian PUPR, seperti bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran yang ada di Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai.
3. Faktor yang mempengaruhi terjadinya permukiman kumuh, serta upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai.

C. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah karakteristik fisik yang dilihat dari kriteria perumahan dan permukiman kumuh menurut Kementerian PUPR, seperti bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran yang terdapat di Kelurahan Pulau Simardan

Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dan faktor yang mempengaruhi terjadinya permukiman kumuh, serta upaya penanganan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Karakteristik fisik permukiman kumuh yang terdapat di Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya permukiman kumuh di Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ?
3. Bagaimana upaya penanganan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik fisik permukiman kumuh di Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai.

2. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi terjadinya permukiman kumuh di Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai.
3. Untuk mendeskripsikan upaya penanganan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai.

F. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai bekal dalam mengaplikasikan pengetahuan teori yang di dapat pada saat perkuliahan.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan memberikan pemahaman baru kepada masyarakat mengenai permukiman kumuh dan upaya penanganannya.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan sumbangan pemikiran dalam mengambil kebijakan terkait dengan penanganan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai.
4. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pembanding dalam melakukan penelitian dengan kajian permasalahan yang sama di wilayah ataupun daerah yang berbeda.